



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona

- Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

BAB II PENJABARAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.

- (2) Rincian APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah		Rp3.456.118.723.559,00
b. Belanja Daerah		Rp3.349.482.220.282,00
	Surplus/(Defisit)	Rp106.636.503.277,00
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan		Rp223.363.496.723,00
2. Pengeluaran		Rp330.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	(Rp106.636.503.277,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan		Rp0,00

Pasal 3

- (1) Uraian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - c. lampiran III : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang dan Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;

- d. lampiran IV : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. lampiran V : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. lampiran VI : Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Belanja Bagi Hasil;;
- g. lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota Dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

BAB III DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

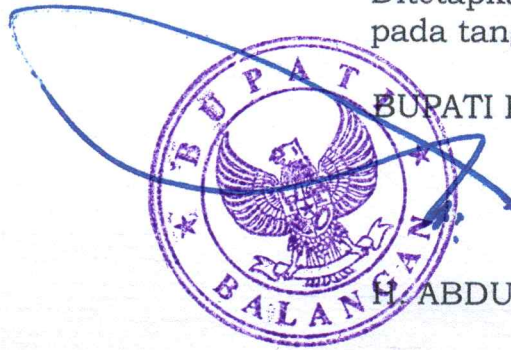
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI BALANGAN,

ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

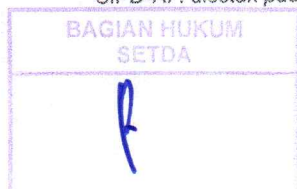


KABUPATEN BALANGAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84.459.582.433,00
4.1.01	Pajak Daerah	12.895.500.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	16.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	16.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	16.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.725.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	225.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	225.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.500.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	4.500.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	13.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	10.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	10.000.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	80.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	80.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	80.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.000.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	4.000.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	4.000.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	20.500.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	20.500.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	20.500.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	6.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	6.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	6.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.750.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.750.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.750.000.000,00

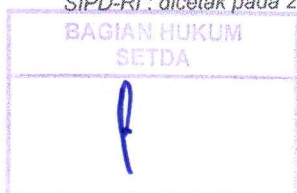


KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	660.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	660.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	660.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.600.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.400.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.400.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.481.891.666,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	449.198.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	150.000.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	150.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	159.204.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	159.204.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	70.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	69.994.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.500.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	68.494.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	732.693.666,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	282.683.666,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	61.683.666,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	78.000.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	10.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	81.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	52.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	205.010.000,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	205.010.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	45.000.000,00
4.1.02.02.04.0002	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	45.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	80.000.000,00
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	120.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	300.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	300.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	300.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.117.190.767,00

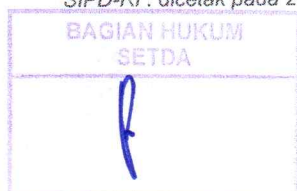


KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	21.117.190.767,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	21.117.190.767,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	21.117.190.767,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.965.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	10.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	10.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.850.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.800.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.800.000.000,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	4.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	105.000.000,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	105.000.000,00
4.1.04.13.01.0020	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	105.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	40.000.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	40.000.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	40.000.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.364.146.506.947,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.274.146.506.947,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.149.116.569.947,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	2.695.679.013.563,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	403.987.180.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9.564.557.663,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.959.682.337,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	306.584.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.272.378.639.563,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.213.717.000,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	148.155.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.120.498.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	378.776.701.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	322.301.106.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	600.000.000,00

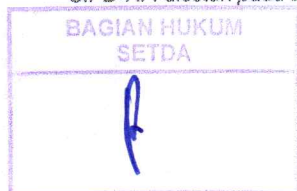
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	4.192.371.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	10.010.581.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	22.044.837.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	19.627.806.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	74.660.855.384,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	50.110.275.384,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.158.000.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.800.000.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	13.907.520.000,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	0,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	3.508.580.000,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.176.480.000,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	0,00
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	0,00
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	109.941.507.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	109.941.507.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	109.941.507.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.088.430.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	15.088.430.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	15.088.430.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	90.000.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	90.000.000.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	90.000.000.000,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.225.910.900,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.051.036.700,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	58.780.048.478,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.943.003.922,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.512.634.179,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.512.634.179,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.512.634.179,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.512.634.179,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.512.634.179,00
	Jumlah Pendapatan	3.456.118.723.559,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.929.705.789.033,00
5.1.01	Belanja Pegawai	585.974.298.108,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	279.118.123.529,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	201.586.118.726,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	169.884.585.046,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	31.701.533.680,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.323.631.250,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.790.082.786,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.533.548.464,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.836.172.667,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.789.685.667,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	46.487.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.420.122.802,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.101.522.844,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.318.599.958,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.258.233.279,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.088.963.525,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	169.269.754,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.726.898.986,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.162.897.536,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.564.001.450,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.032.859.359,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	688.219.412,00

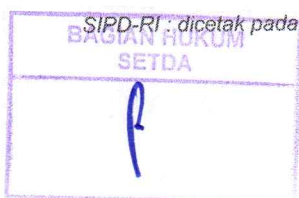


KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	344.639.947,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.395.509,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.346.172,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.049.337,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	17.470.630.143,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	14.973.164.426,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	2.497.465.717,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	666.089.982,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	550.728.755,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	115.361.227,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.767.970.826,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.484.390.406,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	283.580.420,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	231.681.902.345,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	129.918.920.603,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	105.001.730.334,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	24.917.190.269,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	23.195.143.492,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	21.207.946.069,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	1.987.197.423,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.530.161.929,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.629.015.114,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	901.146.815,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	72.037.676.321,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	69.636.155.816,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.401.520.505,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.877.795.384,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	24.500.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	24.500.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	46.833.122.884,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	46.833.122.884,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.000.000.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.000.000.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	800.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	800.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	65.020.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	65.020.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	720.000.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	720.000.000,00
5.1.01.03.09	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	3.277.152.500,00
5.1.01.03.09.0001	Belanja TPG PPPK	3.277.152.500,00
5.1.01.03.10	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PPPK	800.000.000,00
5.1.01.03.10.0001	Belanja TKG PPPK	800.000.000,00
5.1.01.03.11	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	1.358.000.000,00
5.1.01.03.11.0001	Belanja Tamsil Guru PPPK	1.358.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.261.308.338,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	51.236.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	51.236.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	70.167.300,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	70.167.300,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	89.934.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	89.934.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.356.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	13.356.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	735.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	735.000.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	881.174,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	881.174,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	150.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	150.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.346.346.864,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	50.346.864,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.296.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.900.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.900.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	212.310.000,00

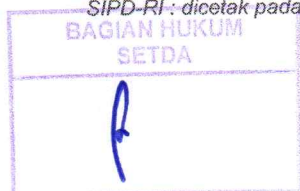
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	212.310.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.732.976.512,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	77.007.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	77.007.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.121.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.121.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	2.422.919.712,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	2.422.919.712,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.575.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.575.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	12.012.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	12.012.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.600,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.600,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.849.760,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	11.849.760,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	299.520,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	299.520,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	673.920,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	673.920,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	156.023.000,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	224.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	66.150.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	168.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	1.120.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	56.000.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	287.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	84.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	350.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	9.240.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	22.400.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	34.490.000,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	5.000.000,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	400.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.500.000,00



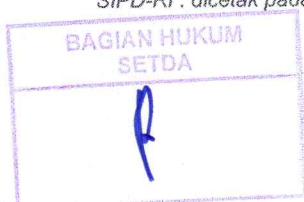
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	6.000.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	15.300.000,00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	300.000,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	350.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	3.640.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	802.192.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	402.192.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	402.192.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	500.000.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	500.000.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	500.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.122.511.460.585,00
5.1.02.01	Belanja Barang	471.077.876.663,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	467.370.455.243,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.383.857.700,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	8.075.474.200,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.211.168.350,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	52.705.500,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.120.351.400,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	37.250.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	147.409.900,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.970.731.965,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.075.894.975,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	17.000.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	248.764.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.256.553.762,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.750.244.451,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.314.336.535,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	668.780.400,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.495.993.800,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	881.692.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.092.635.586,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	303.280.500,00



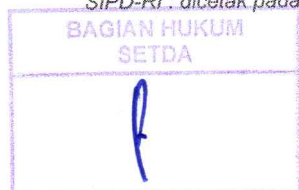
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	872.395.200,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.810.750.850,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	485.550.900,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.044.954.117,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	298.678.250,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	218.497.497.362,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	124.228.491.005,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	31.374.200,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.648.351.780,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	748.573.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	19.100.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.892.097.150,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.611.815.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	240.000.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	123.152.800,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	380.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.483.340.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	1.020.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	202.020.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	179.160.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.082.349.625,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.246.787.080,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	290.880.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	14.240.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	45.835.600,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.492.665.600,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	738.073.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	302.704.800,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	235.491.900,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.707.421.420,00
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	3.688.420.820,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	19.000.600,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	402.836.064.947,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	256.619.983.351,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.560.584.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.364.250.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	123.100.000,00



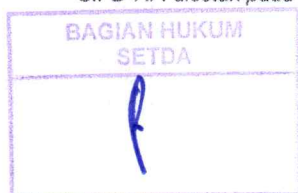
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.437.500.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.880.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	27.000.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	234.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	40.659.500.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	29.699.531.029,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	230.780.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	24.750.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	308.400.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	583.200.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.589.800.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	230.000.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	78.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.260.800.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	4.143.800.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	31.200.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	77.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.227.990.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.575.680.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.865.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	32.066.739.200,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15.022.800.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	7.941.450.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.783.200.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	307.200.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	158.750.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	190.650.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	1.125.660.152,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.010.400.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	186.370.400,00
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	1.176.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	279.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.627.500.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	240.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	10.660.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.055.250.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	125.400.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.053.576.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.438.973.740,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.470.263.750,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.756.848.580,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.179.400.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	1.026.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	41.872.005.400,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.681.680.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	30.512.580.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.441.006.400,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	575.490.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.975.698.800,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.685.550.200,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.387.313.196,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	5.309.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	474.385.200,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	191.500.000,00
5.1.02.02.04.0112	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya	4.500.000,00
5.1.02.02.04.0116	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	88.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	87.300.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	14.500.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	28.417.400,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	150.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	16.567.416,00
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	200.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.126.154.180,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	680.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.065.516.500,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	13.821.600,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	8.600.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	755.094.900,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	192.000.000,00

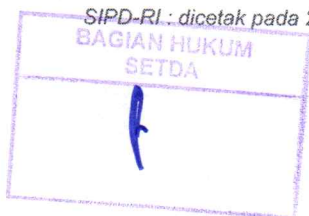


KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	91.000.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	180.000.000,00
5.1.02.02.06.0131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	180.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	322.000.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	322.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.013.700.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.463.060.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	2.214.960.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.135.000.000,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	200.680.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	11.054.561.200,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	1.111.750.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	503.400.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	8.936.691.200,00
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisata	402.720.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	82.260.985.300,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	29.617.158.600,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	190.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	50.656.505.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.797.321.700,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	60.000.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	60.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	34.709.235.775,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.673.460.304,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	450.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	322.030.000,00
5.1.02.03.02.0026	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	21.600.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.471.730.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.068.780.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	333.990.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	231.800.000,00



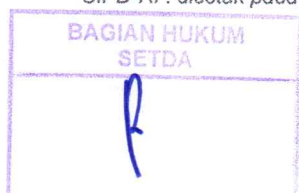
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	12.662.200,00
5.1.02.03.02.0088	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Universal Tester	110.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	729.560.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	417.575.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	4.000.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	78.962.400,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	2.991.000,00
5.1.02.03.02.0140	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	38.500.000,00
5.1.02.03.02.0168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	946.669.704,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	504.430.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	350.520.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	457.660.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.213.838.131,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.530.216.131,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	763.640.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.284.212.000,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	491.360.000,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	311.360.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	217.500.000,00
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	120.710.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	599.344.000,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	1.795.536.000,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	99.960.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.801.937.340,00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	788.073.500,00
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	463.090.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	221.950.240,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	10.104.940.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	723.856.200,00
5.1.02.03.04.0073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	957.190.000,00
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	132.070.400,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	400.000.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	10.767.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	20.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	20.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	139.359.036.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	136.029.036.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	114.217.330.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.135.949.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.675.757.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.330.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	3.330.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.138.185.200,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.239.125.200,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.659.476.900,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	650.575.900,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	9.861.750.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.991.322.400,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	76.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.899.060.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.869.060.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	30.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.405.062.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.405.062.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	17.405.062.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.986.000.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.986.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	38.986.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	208.662.602.940,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.845.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.500.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.500.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.345.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.345.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	200.407.652.940,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	70.108.778.740,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	70.108.778.740,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	62.606.774.200,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.465.900.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.140.874.200,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	67.392.100.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	67.392.100.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	300.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	300.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	683.950.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	683.950.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	683.950.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	726.000.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	726.000.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	726.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.557.427.400,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.395.750.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	4.395.750.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	4.395.750.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.738.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.738.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.738.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	691.362.400,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	691.362.400,00
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	691.362.400,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.732.315.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.732.315.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.732.315.000,00
5.2	BELANJA MODAL	957.747.789.416,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	26.046.370.000,00

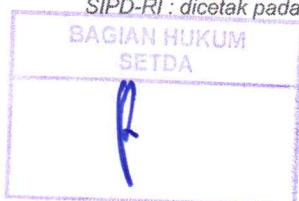
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	21.046.370.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	20.451.370.000,00
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	10.000.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	7.000.000.000,00
5.2.01.01.01.0005	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	3.451.370.000,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	595.000.000,00
5.2.01.01.02.0003	Belanja Modal Tanah Perkebunan	595.000.000,00
5.2.01.99	Belanja Modal Tanah BLUD	5.000.000.000,00
5.2.01.99.99	Belanja Modal Tanah BLUD	5.000.000.000,00
5.2.01.99.99.9999	Belanja Modal Tanah BLUD	5.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	232.866.550.987,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.529.784.700,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.948.020.700,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.900.000.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	1.048.020.700,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	4.581.764.000,00
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	6.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	3.085.000.000,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	750.000.000,00
5.2.02.01.03.0013	Belanja Modal Peralatan Selam	70.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	670.764.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	37.503.331.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	36.928.331.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.278.660.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	15.951.833.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.554.130.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.370.288.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	920.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	5.853.420.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	575.000.000,00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	575.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.656.390.800,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	16.922.500,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	16.922.500,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.639.468.300,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	30.750.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	54.892.500,00



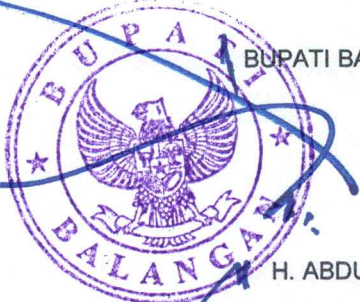
KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1.527.900.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	25.925.800,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.395.710.200,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.395.710.200,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.710.200,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	190.000.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.200.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	32.708.257.080,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	8.497.490.980,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	22.656.400,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.474.834.580,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	23.749.477.700,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	11.337.131.200,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	205.640.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	3.874.611.200,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	36.246.700,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.235.168.600,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	60.680.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	461.288.400,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	382.954.200,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	78.334.200,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.567.977.800,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	7.044.471.200,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.334.560.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.452.560.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	3.257.351.200,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	523.506.600,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	487.506.600,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	6.000.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	30.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	65.069.698.947,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	65.054.698.947,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	65.054.698.947,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	15.000.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	15.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	18.825.473.100,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	184.140.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08.01.0031	Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi	184.140.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	17.538.353.100,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	83.929.100,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	17.454.424.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	1.102.980.000,00
5.2.02.08.08.0006	Belanja Modal Peralatan Umum	1.102.980.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	16.243.041.460,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	13.697.370.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	10.705.990.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.991.380.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.545.671.460,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	12.684.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.143.759.960,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	389.227.500,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	616.625.800,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	616.625.800,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	616.625.800,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	298.736.600,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	298.736.600,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	298.736.600,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	300.000.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	300.000.000,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	300.000.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	38.974.230.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	38.974.230.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	38.581.150.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	277.870.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	115.210.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	185.725.500,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	185.725.500,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	185.725.500,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.991.568.000,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.991.568.000,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.991.568.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.000.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.000.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	291.255.696.029,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	272.011.734.229,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	270.350.814.829,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	104.640.002.442,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	3.960.066.810,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	278.500.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	20.247.109.877,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	10.863.799.200,00
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	22.539.448.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	34.063.050.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.389.310.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	24.408.109.156,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	730.915.800,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	396.000.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	2.053.950.720,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	997.263.824,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	14.146.130.200,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	2.230.703.800,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	26.406.455.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.660.919.400,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	1.265.052.600,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	395.866.800,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	205.000.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	205.000.000,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	205.000.000,00
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	6.002.220.000,00
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	6.002.220.000,00
5.2.03.03.01.0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	6.002.220.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	9.812.741.800,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	9.812.741.800,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	348.590.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	9.464.151.800,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.224.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.224.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	3.224.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	406.160.432.400,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	288.719.385.400,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	330.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	330.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	330.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	330.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	330.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	330.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-106.636.503.277,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



 BUPATI BALANGAN, ✓
 H. ABDUL HADI

